



DINAMIKA POLITIK *Indonesia*



Arif Sobirin Wibowo
Komang Alit Wahyuni
Ida Bagus Weda Wigena

DINAMIKA POLITIK INDONESIA

Arif Sobirin Wibowo
Komang Alit Wahyuni
Ida Bagus Weda Wigena



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DINAMIKA POLITIK INDONESIA

Penulis:

Arif Sobirin Wibowo

Komang Alit Wahyuni

Ida Bagus Weda Wigena

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 61, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-994-5

Cetakan Pertama:

September 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Dinamika Politik Indonesia* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik di Indonesia, sebuah tema yang senantiasa relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sebuah bangsa. Di Indonesia, dinamika politik tidak hanya mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi cermin bagi perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika politik menjadi hal yang sangat penting, baik bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi politik.

Buku ini terdiri dari enam bab yang diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang dinamika politik Indonesia: *Dinamika Politik dalam Konteks Sejarah*: Bab ini menguraikan perkembangan politik Indonesia dari masa ke masa, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era reformasi, untuk memahami konteks historis yang melatarbelakangi situasi politik saat ini. *Struktur dan Fungsi Lembaga Politik*: Bab ini membahas berbagai lembaga politik di Indonesia, termasuk fungsi dan perannya dalam sistem politik nasional. *Dinamika Politik dalam Pemilu*: Bab ini menyoroti bagaimana pemilihan umum menjadi arena utama dalam proses politik, serta dinamika yang menyertainya, mulai dari kampanye hingga hasil pemilu. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Politik*: Bab ini mengeksplorasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi perubahan dan perkembangan politik di Indonesia. *Tantangan dan Hambatan dalam Dinamika Politik*: Bab ini mengupas berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan politik di tengah dinamika yang ada. *Dinamika Politik dan Kekuasaan*: Bab ini membahas hubungan antara politik dan kekuasaan, termasuk bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, dan dipertahankan dalam konteks politik Indonesia.

Dalam penyusunan buku ini, berbagai sumber terpercaya telah digunakan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Meski demikian, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena

itu, saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dalam memahami dan menganalisis dinamika politik Indonesia.

Minahasa, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 DINAMIKA POLITIK DALAM KONTEKS SEJARAH	1
A. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia	1
B. Masa Transisi dari Otoritarian ke Demokrasi.....	5
C. Peran Partai Politik dalam Pemilu	8
BAB 2 STRUKTUR DAN FUNGSI LEMBAGA POLITIK.....	12
A. Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.....	12
B. Hubungan Antara Lembaga Politik dan Partai Politik.....	18
C. Mekanisme Pengawasan dan Kontrol Dalam Lembaga Politik	20
BAB 3 DINAMIKA POLITIK DALAM PEMILU.....	24
A. Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum.....	24
B. Proses dan Bentuk Dinamika Politik dalam Pemilu	26
C. Analisis Hasil Pemilu dan Implikasinya.....	29
BAB 4 FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA POLITIK	32
A. Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Politik	32
B. Peran Media dalam Membentuk Opini Publik	37
C. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Politik.....	40
BAB 5 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM DINAMIKA POLITIK	44
A. Korupsi dan Keterlibatan Uang dalam Politik.....	44
B. Konflik dan Toleransi dalam Masyarakat Politik	45
C. Strategi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	47
BAB 6 DINAMIKA POLITIK DAN KEKUASAAN.....	49
A. Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Politik.....	49
B. Peran Lembaga Politik dalam Membentuk Kekuasaan.....	51
C. Implikasi Kekuasaan dalam Kebijakan Publik.....	54
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB 1

DINAMIKA POLITIK DALAM KONTEKS SEJARAH

A. PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Sistem politik Indonesia telah melalui berbagai fase dari masa kolonial hingga era reformasi. Setiap fase memberikan pembelajaran penting bagi bangsa dalam membangun sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial. Reformasi memberikan peluang besar untuk terus memperkuat demokrasi, namun harus diimbangi dengan upaya serius untuk mengatasi berbagai tantangan politik di masa depan.

1. Masa Kolonial (Pra-Kemerdekaan)

Sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem politik tradisional yang beragam, seperti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha (Sriwijaya, Majapahit) dan kesultanan-kesultanan Islam (Demak, Aceh, Gowa-Tallo). Sistem ini didasarkan pada kearifan lokal yang bercirikan gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan yang berbasis adat istiadat. Meskipun berbentuk monarki, hubungan antara raja dan rakyat sering kali bersifat patron-klien, di mana raja bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pada masa kolonial, sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kekuasaan penjajah, terutama Belanda. Ciri-cirinya:

- Sistem Sentralistik: Kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial Belanda, tanpa melibatkan rakyat Indonesia.
- Dualisme Pemerintahan: Terdapat pemerintahan tradisional (kerajaan) yang berada di bawah kendali langsung pemerintah kolonial.

- Eksploitasi Ekonomi dan Politik: Kebijakan seperti tanam paksa (cultuurstelsel) dilakukan untuk kepentingan ekonomi penjajah.

Upaya perlawanan rakyat Indonesia, baik bersifat tradisional (perang fisik) maupun modern (melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam), mulai menciptakan benih-benih kesadaran politik nasional. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Penguasaan wilayah melalui kebijakan *divide et impera* (politik adu domba) melemahkan solidaritas antarkerajaan dan memperkuat kontrol kolonial. Pemerintah kolonial membentuk struktur politik birokrasi yang sentralistik, seperti Raad van Indie (Dewan Hindia) dan Volksraad (Dewan Rakyat) yang bertujuan melanggengkan kekuasaan penjajah. Sistem ini menciptakan ketimpangan sosial dan memicu gerakan nasionalisme untuk melawan dominasi kolonial.

2. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)

Masa awal kemerdekaan memberikan peluang emas bagi rakyat Indonesia untuk merumuskan identitas politiknya. Namun, keberagaman ideologi politik sering kali memicu konflik, baik di parlemen maupun di masyarakat. Sistem multipartai yang dominan menyebabkan sulitnya mencapai konsensus. Pergantian kabinet yang terlalu sering menghambat program pembangunan nasional. Meski demikian, Pemilu 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menunjukkan antusiasme rakyat dalam berpartisipasi memilih pemimpin. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem politik yang bercirikan:

- Sistem Parlemerter: Berdasarkan UUD 1945 awal, kemudian Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, Indonesia menerapkan sistem parlemerter.
- Pluralisme Politik: Banyaknya partai politik yang berkembang, seperti PNI, Masyumi, PKI, NU, dan lainnya.
- Instabilitas Politik: Sering terjadi pergantian kabinet karena adanya konflik antara partai-partai politik.
- Pemilu Pertama: Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Kegagalan Konstituante dalam merumuskan UUD baru menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945.

3. **Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)**

Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) mengubah paradigma politik dari demokrasi parlementer menjadi otoritarianisme yang terselubung dalam ideologi Nasakom. Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan pada dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Di sisi lain, konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis semakin tajam, yang berpuncak pada peristiwa G30S/PKI. Situasi ini mencerminkan bagaimana sentralisasi kekuasaan tanpa checks and balances dapat melemahkan kehidupan demokrasi. Masa ini ditandai dengan pengaruh besar Presiden Soekarno dalam sistem politik, dengan ciri-ciri:

- Sentralisasi Kekuasaan: Presiden Soekarno menguasai seluruh aspek pemerintahan.
- Nasakom: Upaya menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam politik.
- Minimnya Demokrasi: Fungsi lembaga legislatif dan partai politik dilemahkan.
- Konflik Ideologi: Ketegangan antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis memuncak, terutama setelah peristiwa G30S/PKI.

Periode ini berakhir dengan lahirnya Orde Baru setelah Soekarno diturunkan dari jabatannya.

4. **Masa Orde Baru (1966-1998)**

Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan ciri-ciri:

- Sistem Sentralistik: Kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat dan Presiden.
- Dominasi Golkar: Pemilu dijadikan alat legitimasi kekuasaan, di mana Golkar selalu menang.
- Pembatasan Kebebasan Politik: Pembatasan jumlah partai menjadi tiga (Golkar, PPP, dan PDI), serta kontrol ketat terhadap media dan kebebasan berpendapat.
- Pembangunan Ekonomi: Fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun sering mengorbankan hak-hak politik rakyat.

Orde Baru runtuh akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi pada tahun 1998.

5. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi membawa harapan baru bagi Indonesia dengan berbagai perubahan signifikan, seperti pemberlakuan pemilu langsung, penguatan otonomi daerah, dan pembentukan lembaga antikorupsi seperti KPK. Namun, era ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti maraknya politik uang, polarisasi sosial akibat politik identitas, dan kesenjangan antara pusat dan daerah. Transformasi politik ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan komitmen bersama dari semua elemen bangsa untuk menjaga keberlanjutannya. Era Reformasi dimulai setelah runtuhnya Orde Baru, dengan ciri utama:

- Demokrasi Liberal: Kebebasan berpendapat, pers, dan berorganisasi dijamin.
- Desentralisasi Kekuasaan: Melalui otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah diperkuat.
- Multipolaritas Partai Politik: Jumlah partai politik meningkat, mencerminkan pluralisme.
- Pemilu Langsung: Pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.
- Peran Lembaga Negara yang Kuat: KPK, MK, dan lembaga lainnya diperkuat untuk mendukung sistem checks and balances.

Meskipun demokrasi berkembang, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya partisipasi politik masih menjadi pekerjaan rumah.

6. Tantangan Masa Depan

Dalam konteks kekinian, pendidikan politik menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui pendidikan politik yang inklusif, rakyat dapat memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menolak praktik korupsi serta politik uang. Dengan begitu, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih substansial, bukan hanya prosedural. Perkembangan sistem politik Indonesia menghadapi beberapa tantangan:

- Memperkuat Demokrasi Substantif: Bukan hanya formalitas, tetapi bagaimana demokrasi benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat.

- Menjaga Pluralisme: Mengelola keberagaman suku, agama, dan budaya agar tidak menjadi sumber konflik.
- Mengurangi Korupsi: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- Memanfaatkan Teknologi: Digitalisasi untuk mendukung transparansi politik dan memperluas partisipasi masyarakat.

B. MASA TRANSISI DARI OTORITARIAN KE DEMOKRASI

Masa transisi merupakan periode peralihan dari sistem lama menuju sistem baru. Salah satu tantangan yang mungkin muncul dalam penegakan hukum pada masa ini adalah bahwa sistem penegakan hukum tidak serta-merta berubah, karena rezim hukum lama masih tetap berlaku. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi yang didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat.

Demokrasi menjadi pintu gerbang untuk melakukan perubahan atau reformasi di berbagai bidang, termasuk reformasi hukum. Demokrasi memberikan peran yang luas kepada seluruh rakyat untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja para penyelenggara negara. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa di semua tingkatan pemerintahan. Transisi politik adalah proses perubahan dari sistem politik otoritarian menuju sistem yang lebih demokratis. Proses ini melibatkan berbagai dinamika, termasuk perubahan institusi, aktor politik, dan budaya politik. Dalam konteks Indonesia, transisi ini terjadi ketika runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 yang menandai berakhirnya kekuasaan otoriter Soeharto dan dimulainya era Reformasi. Masa Transisi memiliki beberapa ciri ciri antara lain, Ketidakstabilan Politik: Masa transisi sering ditandai dengan kekacauan politik akibat perbedaan kepentingan antara kelompok yang pro-status quo dan pro-reformasi. Krisis Kepercayaan Publik: Rakyat sering merasa kecewa terhadap pemerintah karena lambatnya perubahan. Kebangkitan Civil Society: Masyarakat sipil mulai bangkit dan berperan aktif dalam proses politik. Reformasi Institusi: Penataan ulang lembaga-lembaga negara untuk memastikan adanya checks and balances.

1. Dinamika Politik dalam Transisi di Indonesia

a. Runtuhnya Orde Baru (1998)

Faktor utama yang memicu runtuhnya Orde Baru adalah krisis multidimensional, termasuk:

- Krisis Ekonomi: Krisis moneter Asia 1997 melemahkan perekonomian Indonesia, memperburuk kondisi rakyat, dan memicu demonstrasi besar-besaran.
- Korupsi dan Nepotisme: Ketidakpuasan terhadap rezim yang sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
- Tekanan Rakyat: Demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya semakin gencar menuntut pengunduran diri Soeharto.

b. Era Reformasi (1998-sekarang)

Masa transisi menuju demokrasi dimulai dengan beberapa langkah penting:

- Pemilu yang Demokratis: Pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999 menjadi tonggak demokrasi di Indonesia.
- Desentralisasi Kekuasaan: Otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 memberikan wewenang besar kepada pemerintah daerah.
- Pembatasan Masa Jabatan Presiden: UUD 1945 diamendemen untuk membatasi jabatan presiden maksimal dua periode.
- Reformasi Lembaga Negara: Didirikannya KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman sebagai bagian dari sistem checks and balances.
- Kebebasan Pers: Media menjadi lebih bebas dalam mengkritisi pemerintah dan mengawal demokrasi.

2. Tantangan dalam Masa Transisi

a. Polarisasi Politik

Masyarakat sering terbelah dalam mendukung aktor politik tertentu. Polarisasi ini semakin tajam akibat politik identitas yang muncul dalam berbagai pemilu.

- b. **Politik Uang dan Korupsi**
Transisi ke demokrasi belum sepenuhnya berhasil menghilangkan praktik politik uang dan korupsi, yang sering menjadi kendala utama dalam demokrasi substantif.
 - c. **Lemahnya Supremasi Hukum**
Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, pelaksanaan supremasi hukum sering kali tidak konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik.
 - d. **Tantangan Ekonomi**
Perubahan sistem politik tidak selalu diiringi dengan perbaikan ekonomi yang merata, sehingga memunculkan ketimpangan sosial.
 - e. **Meningkatnya Ketegangan Sosial**
Dalam masa transisi, konflik horizontal sering muncul, seperti isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), yang dapat menghambat stabilitas politik.
3. **Prestasi dan Pencapaian Transisi**
Meskipun menghadapi banyak tantangan, masa transisi di Indonesia juga mencatat sejumlah pencapaian:
 - **Stabilitas Demokrasi:** Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
 - **Pemilu yang Damai dan Demokratis:** Pelaksanaan pemilu secara langsung dan damai menjadi ciri khas demokrasi Indonesia.
 - **Keterbukaan Politik:** Kebebasan berekspresi dan berserikat semakin meningkat dibandingkan era otoritarian.
 4. **Peran Aktor dalam Transisi**
Transisi politik tidak hanya ditentukan oleh perubahan sistem dan institusi, tetapi juga oleh aktor-aktor yang berperan aktif dalam proses tersebut. Aktor-aktor ini meliputi berbagai pihak dengan peran, kepentingan, dan strategi yang berbeda. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan gerakan mahasiswa memainkan peran penting dalam mendorong reformasi politik. Partai politik menjadi sarana utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam proses demokrasi. Media berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anggraini, F. A. (2024). *Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(2).
- Apandi, A., Cahyani, A. R., & Sari, F. R. (2025). *Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965)*. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1), 73-85.
- Barus, A. E. B. (2023). *DINAMIKA IDENTITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK: TINJAUAN DARI ASPEK POLITIK*. *literacy notes*, 1(2).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict* (Vol. 20). Free Press.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Faulks, K., & Mahadi, H. (2021). *Sosiologi Politik: Teori-Teori Kontemporer Tentang Negara dan Masyarakat Sipil*. Nusamedia.
- Giyandri, T. F., & Basuki Sinaga, J. B. (2024). *Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Harnawansyah, M. F. (2019). *Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50-64.
- Hogwood, B. W. (1984). *Policy analysis for the real world*.
- Husen, A. F. (2024). *Dynamics of the relationship of political parties and cultural patron clients*. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 262-270.
- Imansyah, T. (2012). *Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.

- Isnaeni, B. (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 78.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kamahi, U. (2017). *Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik*.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027-2042.
- Kristian, I. (2007). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di indonesia. *Jurnal dialektika ilmu sosial*, 88-90.
- Loomba, A., Kaul, S., Bunzl, M., Burton, A. M., & Esty, J. (2005). *Beyond what? An introduction*. In *Postcolonial studies and beyond* (pp. 1-40). Duke University Press.
- Lundahl, B., & Burke, B. L. (2009). The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta-analyses. *Journal of clinical psychology*, 65(11), 1232-1245.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Maulany, N. N., & Jelantik, S. K. (2023). Komunikasi Politik Dalam Konteks Sejarah. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation*, 2(2), 151-163.
- Mawaddah, S., & Hajar, I. I. (2024). Teori Konflik Kekuasaan dan Dinamika Politik di Indonesia. *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, 8(1), 14-31.
- Munggaran, T. P. (2023). PERAN DAN PENGARUH PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7).
- MZ, H. I. (2019). Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara dan Sistim Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Ganec Swara*, 13(2), 258-269.

- Navita, B., Putri, R. A., Zahra, J. A., Fredlyna, A. M., Tapiheru, S. L. S., & Hadji, K. (2025).
Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 01-10.
- Newton, J. M., Cohen-Barak, O., Hagiwara, N., Gardner, J. M., Davisson, M. T., King, R. A., & Brilliant, M. H. (2001). Mutations in the human orthologue of the mouse underwhite gene (uw) underlie a new form of oculocutaneous albinism, OCA4. *The American Journal of Human Genetics*, 69(5), 981-988.
- Nuraeni, H. A., Afifah, N. Z., & Faatin, N. K. (2024). Pengaruh Ideologi Modern terhadap Kehidupan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5674-5680.
- Pangareho, N. (2024). Dinamika Politik Pancasila: Antara Idealisme dan Realitas dalam Konteks Indonesia (Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto). *AKADEMIKA*, 23(2), 63-71.
- Rachmawati, D. W., Andrianto, A., Zahra, D. N., Paryanto, P., Rachmad, Y. E., Hidayat, A. W., & Atrianingsi, A. (2022). Pengantar Ilmu Politik.
- Rahardjo, M. (2018). Interaksionisme Simbolik Dalam Penelitian Kualitatif.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rutherford, J. (1990). *Identity: community, culture, difference*. Lawrence & Wishart.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.
- Siregar, M., & Harahap, E. W. (2024). Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi. *Unes Law Review*, 6(4), 10181-10189.
- Sudarnoto, Wisnu. "Konflik dan Resolusi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2.1 (2015): 1-16.
- Sumartono, S. (2019). Dinamika perubahan sosial dalam teori konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 1-17.
- Tambawang, L., Sawir, M., & Pongtuluran, R. (2024). Melihat ke Belakang: Panggung Gemoy dan Dinamika Politik Masa Kini. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).

- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.
- Wahab, S.A., 2021. Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Williams, J. M. E. (1993). *Applied sport psychology: Personal growth to peak performance*. Mayfield Publishing Co.
- Winurti, D. (2020). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 7(2), 141-151.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.

DINAMIKA POLITIK *Indonesia*

Buku ini terdiri dari enam bab yang diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang dinamika politik Indonesia: **Dinamika Politik dalam Konteks Sejarah:** Bab ini menguraikan perkembangan politik Indonesia dari masa ke masa, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era reformasi, untuk memahami konteks historis yang melatarbelakangi situasi politik saat ini. **Struktur dan Fungsi Lembaga Politik:** Bab ini membahas berbagai lembaga politik di Indonesia, termasuk fungsi dan perannya dalam sistem politik nasional. **Dinamika Politik dalam Pemilu:** Bab ini menyoroti bagaimana pemilihan umum menjadi arena utama dalam proses politik, serta dinamika yang menyertainya, mulai dari kampanye hingga hasil pemilu. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Politik:** Bab ini mengeksplorasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi perubahan dan perkembangan politik di Indonesia. **Tantangan dan Hambatan dalam Dinamika Politik:** Bab ini mengupas berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan politik di tengah dinamika yang ada. **Dinamika Politik dan Kekuasaan:** Bab ini membahas hubungan antara politik dan kekuasaan, termasuk bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, dan dipertahankan dalam konteks politik Indonesia.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF
POLITICAL SCIENCE RESEARCHERS

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

